

336.22
m17
f 01

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
memperoleh derajat S-2 Magister Akuntansi**



Diajukan oleh :

**Nama : Mintarsih
N I M : C4C001153**

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2003**

Tesis berjudul

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

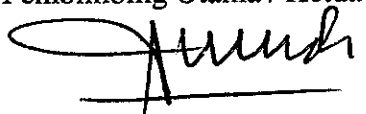
Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Mintarsih

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 September 2003
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

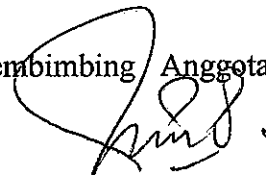
Dosen pembimbing

Pembimbing Utama / Ketua



Drs. H. Mudiantono, M.Sc.

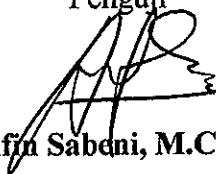
Pembimbing Anggota



Dra. Zulaikha, M.Si., Akt

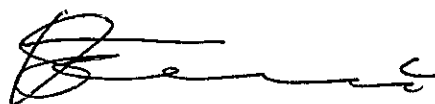
Dewan Penguji

Penguji



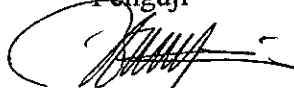
Dr. Arifin Sabeni, M.Com. Hons

Penguji



Dr. Noor Hamid Ustadi, M.Si, Akt

Penguji



Drs. Agus Purwanto, M.Si, Akt

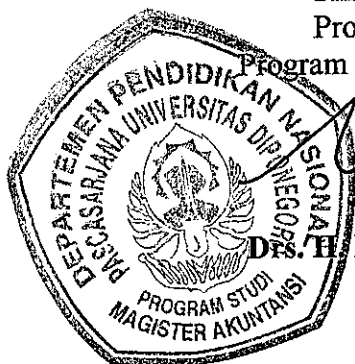
Semarang, September 2003

Universitas Diponegoro

Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Akuntansi

Ketua Program



Drs. H. Moch. Nasir, M.Si, Akt.

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft: 2237/T/MA/04
12 Feb 04

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang diajukan adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain. Sepanjang pengetahuan saya, tesis ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali yang diacu secara tertulis dan disebutkan pada daftar pustaka.

Semarang, September 2003



Mintarsih

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Dengan ilmu hidup ini menjadi mudah

Dengan seni hidup ini menjadi indah

Dengan agama hidup ini menjadi terarah

Kupersembahkan untuk:

Suami dan kedua putri kami

tercinta:

Moch. Hanafi

Melur

Arrum

Sebagai penghargaan atas

Pengertian dan dukungannya

Selama penyusunan tesis ini

ABSTRACT

According to Policy of Local Autonomy. Local Government cannot execute its function better, efficient and effective without enough fund support. The enough fund support to give service to society and execute development program. Some sources of development defrayal in local coming from Original Local Earnings and also Central Government aid, (Not only fund development of infrastructure but also acceptance of PBB). So that role of Tax very big in order to supporting efficacy of development in Local. Therefore it is importance to develop and optimal of acceptance of PBB. Hence require to be conducted by research about PBB.

The aim of this research is to test factors having an effect on to Acceptance of PBB in Local Government Level I Central Java Province. The research using secondary data have as source from Regional Office of Directorate General Tax of PBB Local Government Level I Central Java Province and Statistical Office Bureau Center of Local Government Level I Central Java Province. The data collecting method using direct perception. Hereinafter data processed and analyzed with doubled linear regression.

The result of statistical test indicate that all independent variable have positive influence and significant to variable of dependent either through together and also by partial.

Keyword: Policy, source of defrayal; Efficacy of taxation:

ABSTRAK

Sesuai dengan Kebijakan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan program pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun bantuan Pemerintah Pusat (baik dana pembangunan prasarana maupun penerimaan PBB). Sehingga peranan pajak sangat besar dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di daerah. Karenanya mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan PBB menjadi sangat penting, untuk itu penelitian tentang PBB sangat diperlukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak bidang PBB Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Adapun metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan regresi linier berganda.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen baik secara bersama-sama maupun secara partial.

Kata Kunci : Kebijakan, sumber pembiayaan; Keberhasilan perpajakan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. kami panjatkan berkat rahmat dan karuniaNya sehingga tesis yang berjudul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH”** telah dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Nasir, M.Si., Akt, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. H. Mudiantono, M.Sc., selaku Ketua Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dra. Zulaikha, M.Si., Akt., selaku Anggota Dosen Pembimbing dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Imam Ghozali, M. Com., Akt., selaku Sekretaris Bidang Akademik.
5. Bapak Drs. Kholiq Mahfud, M.Si., selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Akuntansi.
7. Bapak dan Ibu Staf Pengelola Program Studi Magister Akuntansi

8. Ibu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
9. Bapak Ketua Biro Pusat Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Kami menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan.

Semarang, September 2003

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
RINGKASAN / ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	v
RINGKASAN / ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	8
2.1. Telaah Pustaka.....	8
2.1.1. Pengertian Pajak.....	8

2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan	9
2.1.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB	13
2.1.4. Hukum dan Peraturan Pajak	17
2.1.5. Akuntansi dan Pajak	19
2.2. Review Penelitian Terdahulu	20
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	25
2.4. Hipotesis	27
 BAB III. METODE PENELITIAN	 28
3.1. Jenis dan Sumber Data	28
3.2. Populasi	28
3.3. Metode Pengumpulan Data	29
3.4. Definisi Operasional	29
3.5. Teknik Analisis	31
3.5.1. Perumusan Model	31
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	31
3.5.3. Metode Pengujian Hipotesis	34
 BAB IV. PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI HASIL PENELITIAN	 35
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1. Tinjauan Umum Geografis	35
4.1.2. Tinjauan Umum Kependudukan	42
4.1.3. Sistem Pemungutan PBB	44
4.2. Deskripsi Data Penelitian	46

4.2.1. Jumlah Surat Penagihan	46
4.2.2. Jumlah Wajib Pajak Terpilih.....	48
4.2.3. Dana Pembangunan Prasarana	50
4.2.4. Pendapatan Domestic Regional Bruto Per Kapita.....	52
4.2.5. Penerimaan PBB	54
4.3. Analisis Data	56
4.3.1. Persamaan Regresi	56
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	57
4.4. Uji Hipotesis.....	61
4.4.1. Jumlah Surat Penagih, Jumlah Wajib Terpilih, Dana Pembangunan Prasarana, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Perk Kapita	61
4.4.2. Jumlah Surat Penagihan	62
4.4.3. Jumlah Wajib Pajak Terpilih.....	63
4.4.4. Dana Pembangunan Prasarana	64
4.4.5. Pendapatan Domestic Regional Bruto Per Kapita.....	64
4.5. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PBB	65
4.5.1. Jumlah Surat Penagihan	65
4.5.2. Jumlah Wajib Pajak Terpilih.....	66
4.5.3. Dana Pembangunan Prasarana	67
4.5.4. PDRB Per Kapita	68
4.6. Implementasi Hasil Penelitian.....	69

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan.....	71
5.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Proporsi Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi.....	3
2.2.	Daftar Review Penelitian Terdahulu.....	23
4.3.	Pembagian Wilayah KP.PBB Propinsi Jawa Tengah	38
4.4.	Pembagian Wilayah Berdasarkan Lahan Sawah Dan Lahan Kering Di Propinsi Jawa Tengah	41
4.5.	Luas Tanah Yang Dikenakan Pemungutan PBB Berdasar Sektor...	42
4.6.	Komposisi Penduduk Dan Pertumbuhan	43
4.7.	Data Jumlah Surat Penagihan Propinsi Jawa Tengah	47
4.8.	Data Jumlah Wajib Pajak Terpilih Propinsi Jawa Tengah	49
4.9.	Data Dana Pembangunan Prasarana Propinsi Jawa Tengah.....	51
4.10.	Data PDRB Per Kapita Propinsi Jawa Tengah	53
4.11.	Data Penerimaan PBB Propinsi Jawa Tengah	55

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Halaman
2.1.	Kerangka Pemikiran Teoritis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Propinsi Dati I Jawa Tengah.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Nama Lampiran	Halaman
1.	Analisis Regresi Propinsi Jawa Tengah	77
2.	Uji Multikolinieritas Propinsi Jawa Tengah.....	78
3.	Uji Autokorelasi Propinsi Jawa Tengah	80
4.	Uji Heterokedastisitas Propinsi Jawa Tengah	81
5.	Uji Normalitas propinsi Jawa Tengah.....	82
6.	Data Mentah Penelitian	83

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya memanfaatkan segala potensi yang ada di masing-masing daerah; karenanya pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaannya diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000). Sesuai pencerminan dari pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; maka setiap daerah akan memasuki era baru dalam Penataan Sistem Pemerintahan dan Sistem Perekonomian. Setiap daerah dituntut bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain.

Prasetyo Aji (2000) berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan. Dana Pembangunan itulah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Pemerintah Pusat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka sebagai upaya

Pemerintah Daerah dengan cara penggalan sumber-sumber pendapatan daerah baru maupun mengefektifkan cara-cara penarikan PBB.

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai dampak yang luas, karena penerimaan PBB diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah sebesar 90% dan 10% sebagai penerimaan Pemerintah Pusat (Undang-Undang nomor 25 tahun 1999); PBB mempunyai Jumlah Wajib Pajak (WP) terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak lain; Penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini memberikan semangat bagi daerah-daerah untuk meningkatkan berbagai aspek yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Ini merupakan alasan pertama pentingnya penelitian ini.

Ghofir (2000) mengungkapkan bahwa sebelum penerapan otonomi daerah, diperlukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhinya. Syarat tersebut harus dipersiapkan jauh sebelum otonomi daerah tersebut diterapkan. Kondisi ini diperlukan demi kesinambungan pembangunan agar setelah diterapkannya otonomi daerah kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Disamping sumber daya alam dan sumber daya manusia yang telah dimiliki; alternatif pembiayaan pembangunan dapat dicapai yaitu dengan pemberdayaan PBB. PBB adalah salah satu unsur Pendapatan Daerah Sendiri (PDS). PDS merupakan salah satu sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Proporsi PDS terhadap APBD Tingkat I Propinsi Jawa Tengah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1.
PROPORSI PENDAPATAN DAERAH SENDIRI (PDS) TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TINGKAT I
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 1992/1993 - 2001/2002
(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	Penerimaan	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997
1. a.	PDS	257.165	268.654	322.056	312.025	292.046
b.	PAD	45.126	41.065	34.125	36.125	39.081
c.	PBB	12.555	13.556	22.678	22.867	20.547
2.	Penerimaan APBD	109.156.581	119.548.498	146.548.950	188.648.974	173.458.149
3. a.	% PDS terhadap APBD (1a:2)	0,236	0,225	0,220	0,165	0,168
b.	% PAD terhadap APBD (1b:2)	0,041	0,034	0,023	0,019	0,023
c.	% PBB terhadap APBD (1c:2)	0,00150	0,01134	0,01148	0,01212	0,01185
	Perubahan (+ / -)	-3,47	-1,41	1,22	5,60	-2,27

NO.	Penerimaan	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001	2001/2002
1. a.	PDS	242.385	437.702	393.391	446.086	540.431
b.	PAD	49.906	53.497	61.618	39.198	37.865
c.	PBB	16.797	26.182	29.559	30.717	28.934
2.	Penerimaan APBD	175.255.497	279.890.680	316.565.936	329.960.073	305.829.708
3. a.	% PDS terhadap APBD (1a:2)	0,138	0,156	0,124	0,135	0,177
b.	% PAD terhadap APBD (1b:2)	0,028	0,019	0,019	0,012	0,012
c.	% PBB terhadap APBD (1c:2)	0,00958	0,00935	0,00934	0,00931	0,00928
	Perubahan (+ / -)	-19,09	-2,40	-0,18	-0,30	-0,27

Sumber : Nota Keuangan dan APBD Tk. I Jateng

KETERANGAN :

PDS : Pendapatan Daerah Sendiri

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat diketahui bahwa sejak lima periode tahun anggaran terakhir persentase kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah selalu mengalami penurunan secara berturut-turut sejak tahun 1997/1998 s/d 2001/2002, yaitu 0,00958%, 0,00935%, 0,00934%, 0,00931%, 0,00928%. Fenomena diatas menimbulkan pertanyaan mengapa penerimaan PBB Propinsi Jawa Tengah tidak stabil ? Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Hal ini merupakan alasan kedua pentingnya penelitian ini dan sekaligus menjadi fokus penelitian ini.

Tubagus (1992) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain : Kapasitas Administrasi yang tercermin dari jumlah penagihan; Jumlah Penetapan yang berlandaskan pada Perangkat UU dan Peraturan Pelaksanaannya. dan Jumlah Wajib Pajak yang berlandaskan pada masyarakat, khususnya Wajib Pajak dan lingkungannya. Dengan kata lain bahwa faktor-faktor keberhasilan perpajakan adalah faktor administrasi negara dan pajak, faktor undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor masyarakat, khususnya wajib pajak (WP) (Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan perpajakan adalah : Tax law; Tax Administration, Tax Policy, dan Tax payer). Dari hasil penelitian Insukrindo dkk (1994) menemukan bahwa perkembangan pembangunan di wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai obyek pajak, pada akhirnya menjadi obyek pajak PBB.

Kenneth Davey (1995) dalam Anton Sitanggang (2001) menyatakan bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan tingkat inflasi

berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Dari beberapa pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB adalah : jumlah surat penagihan jumlah wajib pajak terpilih (Tubagus, 1992); dana pembangunan prasarana (Insukrindo, 1994); PDRB / Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita (Kenneth Davey, 1995).

Pengetahuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB merupakan input penting bagi Direktorat Jendral Pajak bidang PBB dan instansi lain yang terkait, sehingga mempunyai peranan yang penting di dalam upaya peningkatan keberhasilan penerimaan perpajakan (khususnya PBB). Ini merupakan alasan keketiga pentingnya penelitian ini.

1. 2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak adalah Tax Law, Tax Administration, Tax Policy dan Tax Payer. Faktor Tax Administration, Tax Policy merupakan input penting dalam pengendalian manajemen bagi Direktorat Jenderal Pajak dan aparat lain yang ada kaitannya dengan PBB. Sehingga mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah : “Apakah faktor-faktor dari sisi administrasi dan faktor policy berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ?”. Secara lebih khusus masalah tersebut dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah jumlah surat penagihan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah jumlah wajib pajak terpilih berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ?
3. Apakah Dana Pembangunan Prasarana berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto per Kapita berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah?

Pada dasarnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB, diantara faktor-faktor tersebut yang akan diadakan penelitian adalah “ Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita “. Karena faktor-faktor tersebut mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan penerimaan PBB, dan masih sedikit diadakan penelitian.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh besarnya jumlah surat penagihan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh besarnya jumlah wajib pajak terpilih terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh besarnya dana pembangunan prasarana terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh PDRB per Kapita terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan “Akuntansi perpajakan maupun Akuntansi Pemerintahan.

Selain itu temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah, khususnya aparat perpajakan dalam merealisasikan kebijakan Otonomi Daerah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Guritno Mangkusubroto (1993) Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Pengertian tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suparmoko (1995), yang mengartikan pajak sebagai pembayaran iuran dari rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Soemitro (1991) dan Musgrave (1993) secara tegas menyatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi income anggota masyarakat tanpa memperoleh imbalan secara langsung tetapi sebaliknya pajak merupakan income bagi masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran masyarakat dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat Sumitro (1991); Guritno Mangkusubroto (1993); Musgrove (1993); dan Suparmoko (1995) dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa bagi warganya.

2. Pajak yang dibayar tidak diberikan kontraprestasi secara langsung bagi pembayar pajak.
3. Pajak dipungut dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Pajak berfungsi budgetair, regulated, dan sosial. (Prawirosetoto, 1984; Munauri, 1992; Tubagus Chairul Amachi Zandjani, 1992; Guritno, 1992) (dalam Fraternesi). Pajak berfungsi Budgetair artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk APBN, sedangkan sisi lain APBN yaitu sisi belanja atau pengeluaran Pemerintah berefek multiplier bagi perekonomian negara. (Suparmoko, 1992; Fuad Bawazier, 1994: (dalam Guritno, 1994). Pajak berfungsi regulated artinya pajak adalah instrumen untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan sosial ekonomi negara. Pajak berfungsi sosial artinya pengakuan dan pemanfaatan hak milik perorangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat; dan pajak adalah instrumen untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin.

2.1.2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Seperti yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 1985. yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1994. yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang bersifat kebendaan (Objektif/Zakelyk), artinya penetapan pajak tidak melihat kemampuan ekonomis subyek pajak.

Menurut Soemitro (1991) Tujuan diadakannya perubahan perundang-undangan PBB adalah untuk :

1. Menyederhanakan Peraturan Perundang-undangan Pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.
2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak tersebut.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat mengerti hak dan kewajibannya.
4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sifatnya sama.
5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, tetapi penerimaannya sebagian besar diserahkan kepada daerah. Pajak ini dikenakan atas harta tak bergerak dan yang menjadi dasar pengenaannya adalah obyeknya bukan subyeknya; karena subyek pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak; Oleh karena itu PBB bersifat obyektif. PBB juga disebut pajak langsung karena pajak terhutang dan harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984. Pasal 2 Obyek Pajak PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan.

Pengertian Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. (permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman). Secara umum yang dimaksud dengan Bumi tidak lain adalah tanah yang meliputi tanah pekarangan, sawah, empang, perairan dan laut).

Pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal (misalnya rumah, gedung, kantor, hotel atau pabrik). Disamping itu yang termasuk dalam pengertian bangunan dapat berupa jalan lingkar yang terletak dalam satu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, fasilitas yang dapat memberikan manfaat.

Pasal 2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau Badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan, memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan dan memiliki, menguasai atas bangunan. Dengan kata lain setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan / atau bangunan dapat dikenakan PBB, sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar menumpang.

Pasal 3 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dikenakan PBB adalah Obyek yang digunakan untuk :

1. Semata-mata untuk melayani kepentingan umum, dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan/makam, peninggalan purbakala atau sejenisnya.
3. Digunakan perwakilan Diplomatik, dengan syarat negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985, sebagai mana diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan sistem Perpajakan. Dalam Undang-undang tersebut bahwa dasar pemungutan PBB berupa nilai sewa (atau hasil) per tahun, kemudian diubah menjadi nilai jual bumi dan bangunan. Nilai jual ini diperoleh dari nilai jual sebenarnya bumi bersangkutan (yaitu transaksi pasar).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas nampak jelas bahwa bumi dan bangunan nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum, dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan.

Ciri-ciri/karakteristik khusus PBB (Bambang Suhardito Dan Bambang Sudibyo dalam Fraternesi), adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak (WP) PBB besar, terbanyak dibandingkan wajib pajak lain.
2. Aktivitas penagihan melalui aparat Pemerintah Daerah, Departemen Keuangan.
3. Direktorat Jendral PBB ikut menikmati atau memanfaatkan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Dari segi tujuan pengenaannya, menurut Guritno (1992) PBB bertujuan untuk menjadi sumber penerimaan pemerintah selain PPN dan PPH.
5. PBB dipakai sebagai agunan pinjaman (pembangunan daerah). Perlakuan terhadap dana hasil pemungutan PBB sebagai dana rutin dan bersifat pembangunan umum, bukan pengelolaan terpadu dan bukan sebagai cadangan pelunasan hutang.

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB

2.1.3.1. Jumlah Surat Penagihan

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah kapasitas administrasi yang tercermin dari jumlah surat penagihan (Tubagus,1992; Kaldor,1994; dan Todaro,1994). Kapasitas Administrasi pemerintah pada umumnya dan administrasi perpajakan khususnya jelas mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak. Dalam hal ini untuk dapat melayani pemenuhan kewajiban perpajakan dan sekaligus menggali potensi perpajakan perlu ditetapkan sistem interchecking, baik antar Kantor Pelayanan PBB maupun dengan menggunakan cross data dari instansi di luar KP-PBB. Potensi perpajakan mempunyai kaitan yang sangat erat dengan administrasi perpajakan. syarat terpenting untuk mencapai penerimaan yang maksimum untuk menggali potensi perpajakan dengan sistem administrasi perpajakan yang berlaku seperti penunjukkan wajib pajak; penetapan pemungutan dan penagihan hutang pajak. Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor : KEP-503 / PJ / 2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang : Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak. Kegiatan penagihan ini dapat dijadikan indikator seberapa besar tunggakan pajak dapat direalisasikan.

Kantor Pelayanan Pajak PBB akan menerbitkan/mengirim surat penagihan kepada WP yang menunggak (setelah jatuh tempo belum melunasi kewajiban pajaknya) dengan baik. Dalam jangka waktu 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo dikirim surat teguran. Setelah 1 minggu surat teguran tidak ditanggapi maka

diterbitkan surat penagihan SKP (Surat Ketetapan Pajak); dimana ketetapannya ditambah 25% dari hasil perhitungan PBB.

2.1.3.2. Jumlah Wajib Pajak Terpilih

Rochmat Soemitro (1989) menyatakan bahwa pemilik tanah menarik manfaat dari investasi pemerintah dalam layanan masyarakat dan prasarana. Hal ini berdasarkan “Asas Manfaat” bahwa pemilik tanah membayar pajak sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu merupakan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang harus didaftarkan oleh orang atau badan sebagai subyek pajak adalah : Pertama : semua tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dengan suatu hak dan/atau dimanfaatkan. (Direktori Perpajakan Indonesia, 1992). Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Pasal 4, adalah : orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki; menguasai atas bangunan. Dengan kata lain : Setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan dapat dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar numpang.

2.1.3.3. Dana Pembangunan Prasarana

Penelitian oleh Insukrindo dkk (1994) menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan *assessment ratio* dari 20% menjadi 30% yang disertai dengan perubahan tingkat Batas Tidak Kena Pajak (BTKP) menjadi Nilai Jual Obyek Pajak – Tidak

Kena Pajak (NJOP-TKP) mempunyai pengaruh terhadap penerimaan daerah dan jumlah obyek pajak yang tidak kena pajak. Kenaikan rasio mengakibatkan pokok ketetapan PBB mengalami kenaikan sebesar 10% sampai dengan 50%. Perubahan BTKP menjadi NJOP-TKP yang dibuat kategori kelas rendah, sedang dan tinggi diperoleh hasil bahwa di wilayah pedesaan terdapat 70% obyek termasuk kategori bangunan kelas rendah bebas dari PBB, sedangkan obyek pajak kategori bangunan kelas menengah terdapat 30% obyek pajak yang bebas dari PBB. Jumlah obyek pajak di perkotaan yang tidak ada bangunannya 40% tidak kena pajak, sedangkan di pedesaan 65% tidak kena pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perkembangan pembangunan yang di wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak, atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB.

Berdasarkan teori "*Of The State*" atau teori tentang Negara "*The State in Neoinstitutional Economic*". Negara merupakan lembaga baru ekonomi, artinya Dalam mengelola suatu Negara diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Capital (Capital bersumber dari pajak). Dalam teori ini pengertian dan tujuan pengenaan pajak adalah bahwa pajak sebagai pendukung dalam pengukuran biaya, pengeluaran pajak merupakan pengeluaran paksaan dan tujuan paksaan oleh penguasa untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan diharapkan dapat menghasilkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil

pembangunan daerah ini meliputi peningkatan di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketersediaan prasarana yang dibangun, sebagai salah satu faktor yang menentukan klasifikasi penilaian tanah dan/ atau bangunan yang berdasarkan kondisi lingkungan obyek pajak.

Realisasi dana pembangunan prasarana daerah menunjukkan tingkat fasilitas yang sudah dibangun yang dapat mendukung dan meningkatkan kelas obyek pajak khususnya kelas bumi serta dapat meningkatkan NJOP secara langsung. Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana daerah, semakin tinggi pula penerimaan PBB yang diperoleh melalui penyesuaian (peningkatan) ketetapan pajak terhadap objek pajak yang berada di lingkungan wilayah pembangunan prasarana tersebut.

2.1.3.4. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

Rochmat Soemitro (1989) dan Kenneth Davey (1995) dalam Anton Sitanggang menyatakan bahwa pemilik tanah pada umumnya memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi, oleh karenanya pemilik tanah dapat dijadikan ukuran, meski agak kasar mengenai kemampuan membayar pajak. Dalam teori elastisitasnya menyatakan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Bahwa apabila PDRB dan jumlah penduduk (yang menjadi Subyek Pajak) mengalami perubahan (kenaikan) sebesar 1%, maka penerimaan PBB akan mengalami perubahan sebesar jumlah persentase PDRB dibagi jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan.

Elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya bila harga-harga meningkat, penduduk di suatu daerah berkembang dan pendapatan individu juga bertambah.

2.1.4. Hukum dan Peraturan Perpajakan

Menurut Friedman, (1984) suatu sistem hukum berunsur "*structures*", "*substance*" dan "*legal culture*". *Structures* adalah aparatur yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tersebut, yaitu badan legislative, eksekutif dan yudikatif. *Substance* adalah apa yang dihasilkan oleh suatu sistem hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar, Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan. Sedangkan *legal culture* adalah pandangan orang-orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika sistem hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka Friedman (1994) menyebut *structures* adalah mesin yang menghasilkan, *substance* sebagai produk yang dihasilkan, sedang *legal culture* adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan. *Legal structure* ini memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistem hukum, karena ia berkenaan dengan hal bagaimana persepsi, nilai-nilai, idea dan pengharapan masyarakat terhadap hukum.

Suatu *substances* hukum, termasuk hukum pajak, berutilitas karena ia berkarakteristik (1) adanya kepastian hukum (*rechssicherheit*); (2) Kemanfaatan (*zweckassigheit*); dan (3) Keadilan (*gerechtigheit*).

Hukum pajak yang juga sering disebut hukum fiscal adalah suatu kumpulan peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak ada dua : (1). Hukum pajak material dan (2). Hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah jiwa suatu hukum/perundang-undangan yang mengikat para pelaku hukum, baik disebutkan secara eksplisit ataupun tidak. Contoh hukum pajak material (dalam UUD 1945) disebutkan : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam memori penjelasannya disebutkan : betapa artinya rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan dari mana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengakuan ini menyatakan bahwa pembangunan negara dari, oleh dan untuk rakyat Indonesia melalui pajak. Pajak berdasarkan hukum dan seluruh warga negara Indonesia adalah wajib pajak.

Hukum pajak formil adalah hukum/peraturan formil yang menjelaskan siapa (subyek), apa (obyek), berapa besar, bagaimana dan kapan suatu pelaksanaan penetapan, pengenaan dan penagihan pajak. Undang-undang nomor 12 tahun 2000 merupakan salah satu contoh hukum pajak formil. Dalam undang-undang tersebut adalah aturan hukum yang menetapkan siapa, apa, bagaimana dan kapan seseorang atau suatu tindakan menjadi subyek/obyek pajak (tertentu). Bila seseorang atau suatu tindakan belum diatur dalam aturan hukum pajak formil tersebut maka ia atau

tindakan tersebut bukan subyek/obyek pajak (diperkecualikan sebagai subyek/obyek pajak), walaupun secara material (menurut UUD pasal 23 (2) ia atau tindakan tersebut adalah subyek/obyek pajak).

2.1.5. Akuntansi dan Pajak.

Menurut Accounting Principle Board (APB) (1970); Definisi akuntansi adalah sebagai berikut : *Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions.* Informasi akuntansi ini dipergunakan oleh berbagai pihak, untuk berbagai keperluan. Selain tergantung pada keputusan yang dibuat penggunaan metode pengambilan keputusan, kapasitas pengguna, dan informasi-informasi lain yang tersedia.

Walter F.O Connor (1970) dan Profesor Crossen (Gunadi, 1999) : Menurut Walter F.O'Connor (1970) menyatakan "*Accounting and Taxation is the language of business*". Akuntansi dan perpajakan mempengaruhi hampir semua unsur (kegiatan) usaha dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Sedangkan Profesor Sijbren Crossen (1980) dari Erasmus Unversiteit Rotterdam menyatakan bahwa masalah perpajakan adalah masalah "*book keeping*". Negara yang book keepingnya kurang baik akan mengalami kesulitan untuk menyusun sistem pajak yang baik. Oleh karena itu akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut *Self Assessment System*. Seperti diketahui bahwa tujuan laporan akuntansi sudah diperkenalkan sejak tahun 1990-an ketika sertifikasi profesi (CPA) dan pelaporan akuntansi untuk tujuan perpajakan

juga mulai diperkenalkan, kemudian lebih intens lagi sejak tahun 1925. Sejak saat itu sampai sekarang akuntansi terutama aktivitas pembukuannya merupakan hal yang sangat essential dalam tiap sistem perpajakan di hampir semua negara.

Berdasarkan visi, misi dan strategi Direktorat Jendral Pajak salah satu misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah Misi Fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan tidak tergantung pada bantuan/hutang harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kaitan pajak dan akuntansi yaitu akuntansi mencakup aspek pengendalian (dari sisi administrasi). Dalam melaksanakan pengendalian khususnya untuk instansi pajak perlu memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Sangat strategisnya peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembangunan nasional merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan alasan keempat pentingnya penelitian ini.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang PBB masih terbatas, antara lain :

- (1). Sugeng Wibowo (2001), dalam penelitiannya yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kelalaian membayar PBB dan faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB di Kabupaten Pekalongan.

Dengan variabel bebas jumlah luas lahan (X_1); jumlah luas bangunan (X_2); jumlah wajib pajak (X_3); tertib administrasi (X_4). Jenis data : kualitatif dan

kwantitatif diolah dengan analisa Regresi berganda. Kesimpulan yang diperoleh:

1. Penurunan penerimaan PBB disebabkan karena tingkat kesadaran WP dan keaktifan aparat.
 2. Variabel jumlah WP mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB dengan koefisien regresi : 6.059.971. Sedangkan variabel jumlah luas bangunan dengan koefisien regresi : 22.068.574
- (2). Anton Sitanggang (2001); juga meneliti Tingkat Kepatuhan wajib pajak ditinjau dari sudut jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih dana pembangunan prasarana, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita terhadap penerimaan PBB di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis Uji Regresi dan Korelasi dengan program SPSS, yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor tingkat kepatuhan wajib pajak (jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3). Muclis (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Penerimaan PBB” (Studi Komparasi antara Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal).

Dengan variabel bebas antara lain : jumlah luas lahan/tanah (X_1), jumlah luas bangunan (X_2), jumlah wajib pajak (X_3), tertib administrasi (X_4). Metode pengolahan data dengan menggunakan Regresi Linier berganda dan uji beda struktur dengan Chow Test.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan PBB sangat dipengaruhi oleh luas lahan/tanah, luas bangunan, jumlah wajib pajak dan tertib administrasi.
2. Bila luas lahan/tanah naik maka penerimaan PBB akan meningkat meskipun koefisien regresi = 0,392. Karena penguasaan luas tanah/kapita dari tahun ke tahun cenderung menurun hal ini sebagai akibat pertambahan penduduk.
3. Luas bangunan naik, maka penerimaan PBB akan meningkat.
4. Wajib pajak dalam arti kuantitatif, naik maka penerimaan PBB akan naik. Koefisien variabel = 1,137. Hal ini merupakan andalan dimasa yang akan datang.
5. Ketidaktertiban administrasi akan mempengaruhi penerimaan PBB dalam hal ini berkaitan dengan keakuratan data; tingkat kesalahan dalam penghitungannya.
6. Hasil analisis uji beda melaporkan :
 - Potensi dasar yang dimiliki (Tegal lebih berpotensi) dengan konstanta Kabupaten Tegal (13.735) dan Kabupaten Brebes (9,474).
 - Tegal manajemen kurang sehingga tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga pertumbuhan penerimaan lebih bagus Kabupaten Brebes dengan kata lain : mula-mula intersep Kabupaten Tegal tinggi, tetapi setelah berjalan lebih unggul Kabupaten Brebes.

Dari hasil analisa

- Rata-rata realisasi : Kabupaten Tegal = 82,65 %

Kabupaten Brebes = 99,97 %

- Andalan Kabupaten Tegal = bangunan
 Kabupaten Brebes = luas lahan dan WP
- Administrasi Kabupaten Tegal = tingkat ketertiban : 3,84 %
 Kabupaten Brebes = tingkat ketertiban : 3,34 %

Sedangkan review penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini:

TABEL 2.2.

DAFTAR REVIEW PENELITIAN TERDAHULU

No	NAMA (TAHUN)	VARIABEL	ALAT ANALISIS	TEMUAN / KESIMPULAN
1.	Sugeng Wibowo (2001)	Faktor kelalaian membayar PBB dan penerimaan PBB	Analisis kualitatif, kwantitatif, Uji regresi berganda	1. Peningkatan penerimaan PBB dipengaruhi oleh kesadaran WP dan keaktifan aparat. 2. Jumlah WP dan jumlah bangunan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB dengan koefisien regresi masing- masing : 6.059.971(WP) dan 22.068.574 (jumlah bangunan
2.	Anton Sitanggang (2001)	Tingkat kepadatan WP ditinjau dari sudut jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak, dana pembangunan sarana dan PDRB per kapita terhadap penerimaan PBB di DIY.	Uji regresi dan korelasi dengan program SPSS	Faktor-faktor tingkat kepatuhan WP (jumlah surat penagihan, jumlah surat WP, jumlah dana pembangunan, prasarana dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap penerimaan PBB di DIY.
3.	Muchlis (2002)	Faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB (studi komparatif Kab. Brebes dan Tegal)	Uji regresi linier berganda dengan SPSS, uji beda struktur dengan cow test	(1). Faktor luas lahan, luas bangunan, jumlah WP, tertib administrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB (2). Bila luas lahan naik maka penerimaan PBB akan naik, meskipun koefisien regresi : 0,392 karena penguasaan luas tanah/ kapita dari tahun ke

				<p>tahun menurun akibat penambahan penduduk</p> <p>(3). Variabel wajib pajak mempunyai koefisien : 1,137 hal ini merupakan andalan untuk menaikkan PBB dimasa yang akan datang.</p> <p>(4). Ketidaktertiban administrasi akan mengakibatkan penurunan PBB hal ini terkait dengan keakuratan data dan kesalahan penghitungannya</p> <p>- Uji beda</p> <p><u>Kab. Tegal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi dasar PBB (konstanta : 13,785) - Mula-mula intersep besar kemudian kecil - Penerimaan dan pertumbuhan kurang baik (tahun 98/99 - 2001 : 8,40%) <p>Rata-rata realisasi : 82,65%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andalan berupa : bangunan - Tingkat tertib administrasi : 3,84 % <p><u>Kab. Brebes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi dasar PBB kecil (konstanta : 9,974) - Kemampuan manajemen besar - Intersep kecil kemudian lama-lama membesar - Penerimaan dan pertumbuhan semakin baik (tahun 98/99 - 2001 : 10,49%) <p>Rata-rata realisasi : 99,97%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andalan : luas lahan dan WP - Tingkat tertib administrasi : 3,34%
--	--	--	--	---

Kaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : bahwa penelitian ini akan menguji kembali dari penelitian yang dilaksanakan oleh Sdr. Anton Sitanggang (2001) dalam lokasi dan waktu yang berbeda, apakah hasilnya konsisten.

Disamping itu penelitian ini menyempurnakan dalam hal variabel surat penagihan dan jumlah wajib pajak. Sehingga dalam penelitian ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah :

1. Jumlah Surat Penagihan (X_1)
2. Jumlah Wajib Pajak Terpilih (X_2)
3. Jumlah Dana Pembangunan Prasarana (X_3)
4. Jumlah Pendapatan Domestic Regional Bruto per Kapita (X_4)

3. Kerangka Pemikiran Teoritis

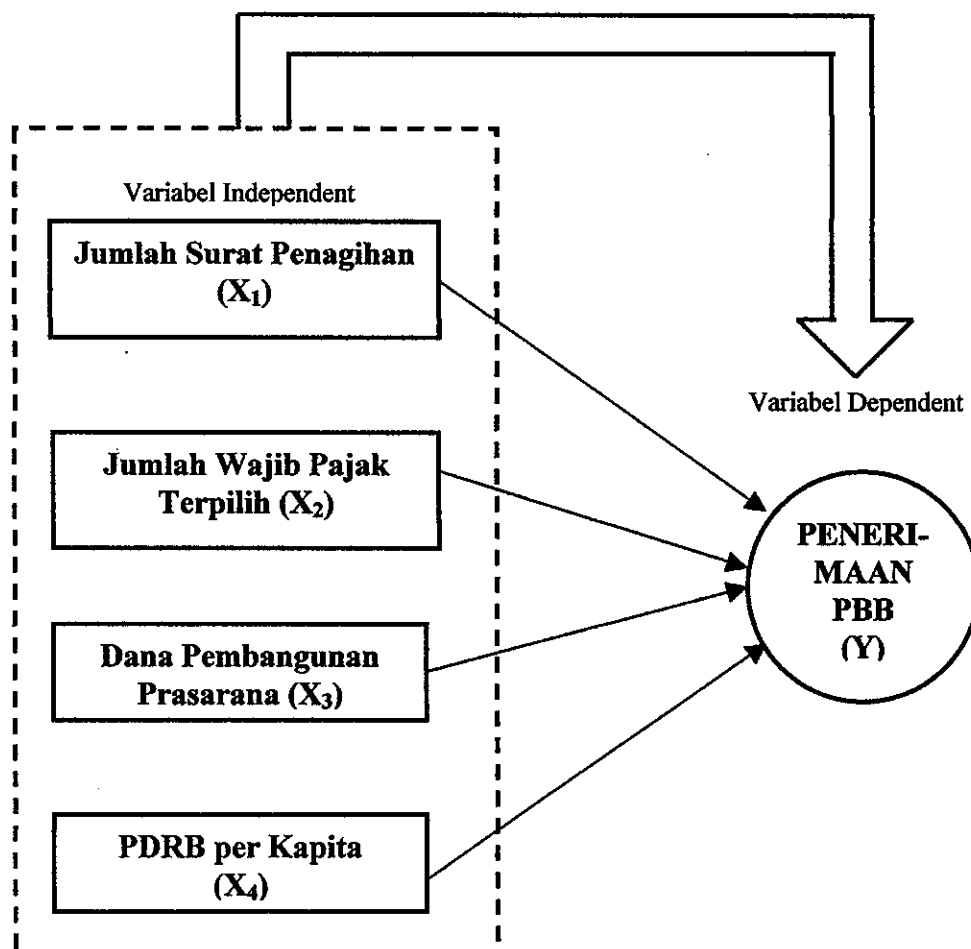
Berdasarkan tinjauan teori yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita secara teoritis mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PBB. Apabila dalam penelitian ini variabel-variabel tersebut terbukti signifikan maka dapat dirumuskan implikasi manajerial (strategis) yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB. Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Kerangka Pemikiran Teoritis untuk menguji hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :



4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka pikir, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- Ho : Jumlah surat penagihan, Jumlah wajib pajak terpilih, Dana pembangunan prasarana, dan Pendapatan domestik regional bruto per kapita secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
- Ha : Jumlah surat penagihan, Jumlah wajib pajak terpilih, Dana pembangunan prasarana, dan Pendapatan domestik regional bruto per kapita secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter dan sumber data adalah data sekunder yang merupakan kombinasi dari time series (runtut waktu) dengan cara cros sectional. Data tersebut diperoleh dari 14 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah (6 karisidenan) dengan rentang waktu antara tahun 1997/1998 - 2002. Perolehan data ini menghasilkan informasi variabel terikat : Jumlah penerimaan PBB serta 2 (dua) variabel tidak terikat yaitu jumlah wajib pajak terpilih, dan jumlah surat penagihan, sedangkan data 2 (dua) variabel tidak terikat lainnya yaitu jumlah dana pembangunan prasarana dan Jumlah PDRB / Kapita diperoleh dari Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Tahun 1997/1998 - 2002.

3.2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini berasal dari semua data yang ada pada 17 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB) seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (6 **Karisidenan**) dengan runtut waktu masing-masing 6 tahunan, rentang waktu sejak Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan terbaru diberlakukan sampai data PBB yang tersedia (1997/1998 s/d 2002).

3.3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data melalui observasi data sekunder yang berasal dari Kantor Direktorat Jendral Pajak bidang PBB Propinsi Jawa Tengah; Kantor Pelayanan PBB (KP-PBB di Propinsi tingkat I Jawa Tengah; Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.

3.4. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

(1). Jumlah surat penagihan (X1) :

Surat penagihan adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh KP-PBB dikenakan kepada wajib pajak terpilih yang sampai batas waktu jatuh tempo pembayaran belum memenuhi kewajibannya.

Adapun pengukurannya : Ratio jumlah surat penagihan yang terealisasi dengan jumlah surat penagihan yang dikirim kepada wajib pajak terpilih dari tahun anggaran 1997/1998 - 2002.

(2). Jumlah wajib pajak terpilih (X2) :

Wajib pajak terpilih adalah wajib pajak yang tercantum pada Buku Daftar Himpunan Ketetapan (DHKP) yang mempunyai ketetapan \geq Rp. 5.000.000,00) (Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep. 503/PJ/2000 tanggal 22 November 2000 tentang Tata cara penerbitan surat tagihan PBB dan tata cara pelaksanaan penagihan PBB dan Bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan). Adapun pengukurannya adalah daftar wajib pajak yang tercantum pada Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang mempunyai ketetapan \geq Rp 5.000.000,- dari tahun anggaran 1997/1998 - 2002.

(3). Dana Pembangunan Prasarana (X3) :

Dana Pembangunan Prasarana adalah dana bantuan yang diserahkan setiap tahun dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang khusus dialokasikan untuk pembangunan prasarana di wilayah tertentu. Adapun pengukurannya adalah Besarnya Realisasi Anggaran Pembangunan Propinsi Dati I Jawa Tengah tahun 1997/1998 – 2002.

(4). Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita (X4) :

PDRB/kapita adalah pendapatan kotor yang diterima masyarakat di suatu wilayah tertentu dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Adapun pengukurannya adalah : Besarnya angka Realisasi pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita di Propinsi Dati I Jawa Tengah tahun 1997/1998 – 2002.

(5). Penerimaan PBB (Y) :

Penerimaan PBB adalah angka yang menunjukkan besarnya setoran pajak dari masyarakat kepada negara sesuai dengan ketetapannya.

Adapun pengukurannya adalah angka yang menunjukkan realisasi setoran PBB secara bruto yang diterima oleh KP PBB di Propinsi Dati I Jawa Tengah tahun 1997/1998 – 2002.

3.5. Teknik Analisis

3.5.1. Perumusan Model

Setelah ditentukan variabel dependen dan variabel independen yang akan diuji, selanjutnya adalah menentukan model penelitian yang menjelaskan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Model yang digunakan adalah regresi yang dinyatakan ini dengan fungsi sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1992) :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4 \dots + e$$

Dimana :

Y = Jumlah penerimaan PBB

X₁ = Jumlah surat penagihan

X₂ = Jumlah wajib pajak terpilih

X₃ = Jumlah dana pembangunan prasarana

X₄ = Jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto / kapita

a = Intersep/ konstanta

b₁ = Koefisien regresi jumlah surat penagihan

b₂ = Koefisien regresi jumlah wajib pajak terpilih

b₃ = Koefisien regresi dana pembangunan prasarana

b₄ = Koefisien regresi Pendapatan Domestik Regional Bruto / kapita

e = Residual term

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan model regresi dalam penelitian ini menyebabkan perlu dilakukan pengamatan terhadap adanya kemungkinan penyimpangan asumsi klasik.

Menurut Damodar N. Gujarati (1988) terdapat 7 (tujuh) asumsi klasik yang harus diamati dalam penggunaan model regresi ini, namun menurut ekonometrik hanya 4 (empat) yang dianggap penting. Keempat asumsi tersebut adalah : uji terhadap gejala multikolinearitas; uji terhadap gejala autokorelasi (serial korelasi), uji terhadap gejala heteroskedastisitas dan uji normalitas.

(1). Uji terhadap gejala multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonearitas di dalam model regresi yaitu (1) Nilai *R square* (R^2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (terikat), (2). Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas, (3). Melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10 (Imam Ghazali, 2001).

(2). Uji terhadap gejala autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound ($d1$), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif
3. Bila nilai DW lebih besar daripada $(4-d1)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah($d1$) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-d1)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

(3). Uji terhadap gejala heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Imam Ghazali, 2001).

(4). Uji Normalitas.

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.

Pengambilan kesimpulan dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot. Bila histogram hampir menyerupai genta dan titik variance semuanya mengikuti arah garis diagonal menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas artinya layak dipakai. (Imam Ghozali, 2001).

3.5.3. Metode Pengujian Hipotesis.

Pengujian hipotesis untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel tidak terikat (X) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y) dengan menggunakan uji statistik (uji F). Sedangkan pengujian hipotesis untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel tidak terikat (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y) dengan Uji Statistik (Uji T). Adapun tingkat signifikansi diperhitungkan melalui program Statistical Packege for Social Science (SPSS). Keputusan yang diambil adalah : tingkat signifikansi apabila $\alpha = 5\%$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam Pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, disajikan: Tinjauan secara umum letak geografis, kependudukan, sistem pemungutan PBB:

1.1. Tinjauan Umum Geografis

1.1.1. Letak Geografis

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua propinsi yaitu Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah terletak antara 5°40" dan 8°30" lintang selatan dan antara 108.30 dan 111.30 Bujur Timur.

1.1.2. Luas Wilayah dan Tata Guna Lahan

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 6 (enam) kota Karisidenan yaitu (29 Kabupaten dan 6 Kota).

- Kota Karisidenan Semarang
- Kota Karisidenan Pekalongan
- Kota Karisidenan Banyumas
- Kota Karisidenan Pati
- Kota Karisidenan Surakarta
- Kota Karisidenan Kedu

Adapun pembagian wilayah dari keenam Kota Karisidenan tersebut adalah sebagai berikut:

- Kota Karisidenan Semarang, meliputi:

- Kota Semarang
- Kabupaten Demak
- Kabupaten Grobogan
- Kota Salatiga
- Kabupaten Semarang
- Kabupaten Kendal
- Kota Karisidenan Pekalongan, meliputi:
 - Kota Tegal
 - Kabupaten Tegal
 - Kabupaten Brebes
 - Kota Pekalongan
 - Kabupaten Pekalongan
 - Kabupaten Batang
 - Kabupaten Pemalang
- Kota Karisidenan Banyumas, meliputi :
 - Kabupaten Banyumas
 - Kabupaten Cilacap
 - Kabupaten Purbalingga
 - Kabupaten Banjarnegara
- Kota Karisidenan Pati, meliputi :
 - Kabupaten Pati
 - Kabupaten Blora
 - Kabupaten Rembang
 - Kabupaten Kudus

- Kabupaten Jepara
- Kota Karisidenan Surakarta, meliputi :
 - Kota Surakarta
 - Kabupaten Boyolali
 - Kabupaten Sragen
 - Kabupaten Karanganyar
 - Kabupaten Klaten
 - Kabupaten Sukoharjo
 - Kabupaten Wonogiri
- Kota Karisidenan Kedu, meliputi :
 - Kota Magelang
 - Kabupaten Magelang
 - Kabupaten Temanggung
 - Kabupaten Wonosobo
 - Kabupaten Purworejo
 - Kabupaten Kebumen

Dari 6 (enam) wilayah karisidenan yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 (enam) Pemerintah Kota, belum semua kota/kabupaten mempunyai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB). Untuk memenuhi Kebutuhan pelayanan PBB, maka diadakan pembagian wilayah, sehingga untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3. di bawah ini :

TABEL 4.3.

**PEMBAGIAN WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN 2002**

No.	Wilayah Kota Karisidenan	Kantor Pelayanan PBB (KP. PBB)	Kabupaten / Kota
1.	Kars. Semarang	- KP. PBB. Semarang	1. Kota Semarang
		- KP. PBB. Demak	1. Kab. Demak
			2. Ka. Grobogan
		- KP. PBB. Ungaran	1. Kota Salatiga
			2. Kab. Semarang
			3. Kab. Kendal
2.	Kars. Pekalongan	- KP. PBB. Tegal	1. Kota Tegal
			2. Kab. Tegal
		- KP. PBB. Pekalongan	1. Kota Pekalongan
			2. Kab. Pekalongan
			3. Kab. Batang
			4. Kab. Pemalang
3.	Kars. Banyumas	- KP. PBB. Purbalingga	1. Kab. Purbalingga
			2. Kab. Banjarnegara
		- KP. PBB. Purwokerto	1. Kab. Banyumas
			2. Kab. Cilacap
4.	Kars. Pati	- KP. PBB. Pati	1. Kab. Pati

			2. Kab. Blora
			3. Kab. Rembang
		- KP. PBB. Kudus	1. Kab. Kudus
			2. Kab. Jepara
5.	Kars. Surakarta	- KP. PBB. Surakarta	1. Kota Surakarta
			2. Kab. Boyolali
			3. Kab. Sragen
			4. Kab. Karanganyar
		- KP. PBB. Klaten	1. Kab. Klaten
			2. Kab. Sukoharjo
			3. Kab. Wonogiri
6.	Kars. Kedu	- KP. PBB. Magelang	1. Kota. Magelang
			2. Kab. Magelang
		- KP. PBB. Temanggung	1. Kab. Temanggung
			2. Kab. Wonosobo
		- KP. PBB. Purworejo	1. Kab. Purworejo
			2. Kab. Kebumen

Sumber Data : Kanwil Dirjend Pajak Bidang PBB Propinsi Jawa Tengah

Luas wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tahun 2002 tercatat sebesar : 493571 ha

Terdiri dari lahan sawah : 247621 ha

Bukan lahan sawah/kering : 245850 ha

Perkembangan suatu kota, antara lain ditandai dengan adanya pembangunan di wilayah tersebut. Kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan pada umumnya akan merubah tata guna lahan antara lain: dengan berubahnya fungsi lahan persawahan di pinggiran kota menjadi lahan untuk kawasan industri, perumahan, perkotaan, dan fasilitas sosial lainnya. Perubahan tata guna lahan dari lahan persawahan menjadi lahan kering untuk pembangunan gedung akan menyebabkan nilai jual lahan sebagai obyek PBB semakin besar, yang pada gilirannya nanti akan dapat mempengaruhi penerimaan PBB.

Di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah berdasarkan pembagian wilayah kota Karesidenan telah terjadi pergeseran fungsi tanah dari semula berupa tanah sawah maupun tanah. kering berubah menjadi areal industri maupun perumahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut ini:

TABEL 4.4.
PEMBAGIAN WILAYAH BERDASARKAN LAHAN SAWAH & LAHAN KERING
DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH TH. 1998 / 2002
(dalam Ha)

KOTA KARSIDENAN	1998			1999			2000			2001			2002		
	LAHAN SAWAH	LAHAN KERING	JUMLAH	LAHAN SAWAH	LAHAN KERING	JUMLAH	LAHAN SAWAH	LAHAN KERING	JUMLAH	LAHAN SAWAH	LAHAN KERING	JUMLAH	LAHAN SAWAH	LAHAN KERING	JUMLAH
SEMARANG	45166	25483	70649	34178	22195	56373	38586	37165	75751	37517	25489	62986	36799	31480	68279
LUAS : (%)	63,93	36,07		60,63	39,37		50,94	49,06		59,56	40,44		53,90	46,10	
PEKALONGAN	42052	14806	56858	42821	27289	70110	45120	33305	78425	44886	39685	84371	36618	38291	74909
LUAS : (%)	74,22	25,78		61,08	38,92		57,53	42,47		52,96	47,04		48,88	51,12	
BANYUMAS	32523	19627	52150	37563	32613	70176	44497	49526	94023	47023	50492	97515	41273	45968	87241
LUAS : (%)	62,36	37,64		53,53	46,47		47,33	52,67		48,22	51,78		47,31	52,69	
PATI	35090	15360	50450	39286	34167	73453	36620	35970	72590	38895	48897	87592	42308	48384	90692
LUAS : (%)	69,55	30,45		53,48	46,52		50,45	49,55		44,40	55,60		46,65	53,35	
SURAKARTA	50952	35821	86773	40384	38864	79248	38950	34770	73720	29630	28906	58536	46397	42291	88688
LUAS : (%)	58,72	41,28		50,96	49,04		52,84	47,16		50,62	49,38		52,31	47,69	
KEDU	46376	28631	75007	38785	29585	68370	41352	37259	78611	35105	37819	72924	44226	39536	83762
LUAS : (%)	61,83	38,17		56,73	43,27		52,60	47,40		48,14	51,86		52,80	47,20	
JUMLAH	252159	139528	391687	233017	184713	417730	245125	227995	473120	232856	231087	463923	247621	245850	493571

Sumber Data : Kantor BPS. Prop. Jawa Tengah

Adapun luas tanah yang dikenakan pemungutan PBB menurut sektor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat dijelaskan pada Tabel 4.5. berikut ini:

TABEL 4.5.

**LUAS TANAH YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN PBB
BERDASARKAN SEKTOR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH TAHUN 2002**

No.	Sektor	Luas (m)
1.	Pedesaan	21277,54
2.	Perkotaan	32416,28
3.	Perkebunan	41692,58
4.	Pertanian	24791,88
5.	Pertambangan	33628,33
6.	Kehutanan	54273,89
Jumlah		208080,5

Sumber Data : Kantor Biro Pusat Statistik Prop. Dati I Jateng

4.1.2. Tinjauan Umum Kependudukan

4.1.2.1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator dalam menetapkan potensi/target penerimaan PBB terutama prediksi potensi subyek/wajib pajak. Jumlah penduduk dan pertumbuhannya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut ini :

TABEL 4. 6.
KOMPOSISI PENDUDUK DAN PERTUMBUHANNYA
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN 1998-2002
(dalam jiwa)

NO.	KARISIDENAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		1998	1999	2000	2001	2002	
1	SEMARANG	2876834	3093507	3698845	3819447	4118067	0,124 (12%)
2	PEKALONGAN	897594	432764	1516678	1607299	2425996	0,129 (13%)
3	BANYUMAS	765837	971494	1251885	1260758	1351608	0,162 (16%)
4	PATI	673962	1359773	1380688	1797438	2169370	0,147 (15%)
5	SURAKARTA	1679735	1810253	1974889	2134659	2307447	0,168 (17%)
6	KEDU	918392	845798	859415	995179	1701780	0,142 (14%)
	Jumlah	7812354	8513589	10682400	11614780	14074268	

Sumber Data : Biro Pusat Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 6. di atas jumlah penduduk:

Tahun 1998 = 7.812.354 jiwa Tahun 1999 = 8.513.589 jiwa

Tahun 2000 = 10.682.400 jiwa Tahun 2001 = 11.614.780 jiwa

Tahun 2002 = 14.074.268 jiwa

Sedangkan rata-rata pertumbuhannya = 17,44 %

4.1.3. Sistem Pemungutan PBB

Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB telah melakukan penyempurnaan system dan prosedur perpajakan. Dasar hukum yang melandasi pelaksanaan atau pengelolaan pemungutan PBB yang diatur dalam :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
2. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1988 tentang Batas Wilayah Propinsi Jawa Tengah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 971/8567/PUOD tanggal 3 Juli 1986 tentang pelaksanaan pelimpahan wewenang penagihan dan imbalan pembagian biaya pemungutan PBB.

Sistem pemungutan PBB di Propinsi Jawa Tengah mulai tahun 1991/1992 telah menggunakan "Sistem Tempat Pembayaran" (SISTEP) dan Sistem Kolektor. SISTEP adalah tata cara pembayaran, penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB melalui tempat yang telah ditentukan, misalnya di kantor Pos dan Giro setempat dan Bank-Bank yang telah ditunjuk oleh masing-masing Karisidenan.

Penerapan sistem SISTEP ini pada dasarnya tidak semata-mata langsung meningkatkan penerimaan PBB, tetapi lebih berfungsi sebagai bentuk peningkatan pelayanan pembayaran PBB, khususnya mempercepat layanan pembayaran (memperpendek antrian) maupun mendekatkan jarak tempat pembayaran dengan

domisili WP yang bersangkutan. Sistem Pemungutan PBB dengan SISTEP ini belum bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga terdapat sebagian yang menggunakan sistem non SISTEP yaitu melalui kolektor. Pemungutan PBB melalui kolektor, biasanya dilakukan di tiap-tiap kelurahan yang dikoordinir oleh kepala kelurahan setempat. Adapun urutan-urutan dari pelaksanaan pemungutan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala kelurahan menunjuk salah satu pamong desa untuk melakukan pemungutan pada tiap-tiap warga atau wajib pajak. Kemudian uang setoran PBB tadi dihimpun atau dicatat dalam DPH (Daftar Penerimaan Harian) yang biasanya terdiri dari empat lembar, yaitu :
 - Lembar 1 untuk petugas pemungut
 - Lembar 1 untuk Dipenda
 - Lembar 1 untuk Kecamatan
 - Lembar 1 untuk Kelurahan
2. Selanjutnya bukti penyeteroran PBB tadi disampaikan ke kecamatan dan Dipenda. Sedangkan uang hasil setoran PBB dibayarkan ke kantor Pos dan Giro setempat, atau ke kantor bank yang sudah ditunjuk.

Sedangkan Sistem pemungutan PBB dengan perincian dari tiap-tiap sektor, adalah :

1. Untuk sektor pedesaan, pemungutan PBB dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat atas ijin SK Kepala Daerah Karisidenan masing-masing.
2. Untuk sektor perkotaan, wajib pajak menyetorkan PBB-nya langsung ke tempat pembayaran, dalam hal ini kantor Pos dan Giro / Kantor Bank yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran PBB.

3. Untuk sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan, wajib pajak menyetorkan PBB-nya ke kas daerah (bagian keuangan daerah).

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Propinsi Jawa Tengah dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, yang antara lain: jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana dan PDRB per Kapita. Data faktor-faktor dan besarnya penerimaan PBB tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

4.2.1. Jumlah Surat Penagihan

Jumlah surat penagihan pajak merupakan ukuran dari kapasitas administrasi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan PBB. Jumlah penagihan sekaligus dapat digunakan untuk menggali potensi perpajakan. Administrasi yang efisien karena didukung sarana dan petugas yang berdedikasi sesuai peraturan yang berlaku merupakan hal yang terpenting untuk mencapai penagihan pajak dan penggalan potensi pajak secara maksimum.

Penagihan pajak dilakukan atas utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak. Kegiatan penagihan ini mencerminkan seberapa besar tunggakan pajak dapat dicairkan yang pada akhirnya menjadi penerimaan yang riil untuk pemerintah. Secara rinci jumlah surat penagihan di Propinsi Jawa Tengah tahun 1997/1998-2002 dapat dilihat pada Tabel 4.7. berikut ini:

TABEL 4.7.
DATA JUMLAH SURAT PENAGIHAN DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH (X1)
TAHUN 1997/1998-2002
(dalam %)

Keterangan	1997/1998	1998/1999	%	1999/2000	%	2000	%	2001	%	2002	%
Karesidenan Semarang	0,8	0,727	0,073	0,95	0,223	0,693	0,470	0,76	0,070	0,585	-0,078
Karesidenan Pekalongan	0,9	0,8	0,100	0,9	0,100	0,932	0,832	0,79	-0,142	0,716	-0,074
Karesidenan Banyumas	0,9	0,884	0,016	0,826	-0,058	0,752	0,810	0,68	-0,075	0,631	-0,046
Karesidenan Pati	0,7	0,914	-0,214	0,771	-0,143	0,717	0,860	0,55	-0,166	0,611	0,060
Karesidenan Surakarta	0,9	0,894	0,006	0,83	-0,064	0,669	0,733	0,56	-0,109	0,45	-0,110
Karesidenan Kedu	0,9	0,83	0,070	0,667	-0,163	0,723	0,886	0,39	-0,330	0,628	0,235
Jumlah	0,85	0,841	0,051	0,824	-0,105	0,747	4,591	0,622	-0,752	0,62	-0,013

iber :

Data Sekunder Diolah
Kanwil Dirjen Pajak Bidang PBB Propinsi Dati I Jawa Tengah

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun jumlah surat penagihan pajak baik secara keseluruhan di Propinsi Jawa Tengah maupun pada masing-masing Karisidenan semakin bertambah banyak. Prosentase pertambahan kenaikan jumlah surat penagihan tertinggi pada Propinsi Jawa Tengah adalah pada tahun 2000 (4,591%) dan terkecil pada tahun 2001 (-0,752%) dari tahun sebelumnya.

4.2.2. Jumlah Wajib Pajak Terpilih

Jumlah wajib pajak merupakan potensi dari penerimaan pajak, walaupun tidak semua wajib pajak selalu membayar pajak untuk suatu masa pajak tertentu yang dapat disebabkan berbagai hal seperti sengaja atau tidak ada objek yang dapat dikenakan pajak karena sesuatu hal. Dalam perkembangannya, jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun selalu bertambah termasuk di Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah wajib pajak (WP) di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1997/1998 sampai dengan 2002 dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut ini :

TABEL 4.8.
DATA JUMLAH WAJIB PAJAK TERPILIH DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH (X2)
TAHUN 1997/1998-2002
(dalam orang)

Keterangan	1997/1998	1998/1999	%	1999/2000	%	2000	%	2001	%	2002	%
Karesidenan Semarang	1031956	1583759	53,472	1742355	10,014	1829472	5,000	2231956	22,000	2544429	14,000
Karesidenan Pekalongan	561495	601300	7,089	691495	15,000	788304	14,000	890783	13,000	1024400	15,000
Karesidenan Banyumas	401496	301496	-24,907	339795	12,703	434154	27,769	503618	16,000	564052	12,000
Karesidenan Pati	284894	245745	-13,742	294894	20,000	356822	21,000	392504	10,000	459229	17,000
Karesidenan Surakarta	1833719	1137170	-37,986	1398719	23,000	1608526	15,000	1833719	14,000	2117945	15,500
Karesidenan Kedu	911869	926558	1,611	1111869	20,000	1289768	16,000	1547721	20,000	1754401	13,354
Jumlah	5025429	4796028	-4,665	5579127	16,328	6307046	13,047	7400301	17,334	8464456	14,380

iber :

Data Sekunder Diolah
Kanwil Dirjen Pajak Bidang PBB Propinsi Dati I Jawa Tengah

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya dana pembangunan prasarana PBB tidak stabil (fluktuatif). Prosentase pertambahan kenaikan jumlah wajib pajak terpilih tertinggi pada Propinsi Jawa Tengah adalah pada tahun 2001 (17,334%) dan penurunan jumlah wajib pajak terpilih terkecil adalah pada tahun 1998/1999 (-4,565%) dari tahun sebelumnya.

Kenaikan wajib pajak tersebut dapat terjadi karena ekstensifikasi yakni pertambahan Wajib Pajak (WP), karena meningkatnya kepemilikan objek pajak berupa tanah dan bangunan serta meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakat yang masa sebelumnya belum terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB.

4.2.3. Dana Pembangunan Prasarana

Perkembangan pembangunan yang di suatu wilayah akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (menunjukkan tingkat fasilitas yang sudah dibangun), atau yang sebelumnya dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan dana pembangunan prasarana di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1997/1998 sampai dengan 2002 dapat dilihat pada Tabel 4.9. berikut ini:

UPT-PUSTAK-UNDIP

TABEL 4.8.
DATA DANA PEMBANGUNAN PRASARANA DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH (X3)
TAHUN 1997/1998-2002
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1997/1998	1998/1999	%	1999/2000	%	2000	%	2001	%	2002	%
Karesidenan Semarang	16081246,7	14497926,3	-9,846	16069049,7	10,837	15559790,3	-3,169	17396659,8	11,805	18596647,4	6,898
Karesidenan Pekalongan	18604721,18	16454110,67	-11,559	19259462,16	17,050	21975334	14,101	20766185,7	-5,502	23208262,5	11,760
Karesidenan Banyumas	11728454,84	9124216,51	-22,204	11724866,98	28,503	13665870,2	16,555	16374656,8	19,822	14992588,6	-8,440
Karesidenan Pati	21974953,74	19321274,95	-12,076	21245721,52	9,960	25429086,3	19,690	23257401,2	-8,540	27494769,1	18,219
Karesidenan Surakarta	16821674,92	10959341,62	-34,850	14268380,71	30,194	12694751,3	-11,029	16443626,6	29,531	15374720,5	-6,500
Karesidenan Kedu	19985454,4	17466528,5	-12,604	19102426,3	9,366	23149481,9	21,186	20114954,7	-13,108	20817359,9	3,492
Jumlah	105196505,8	87823398,55	-16,515	101669907,4	15,766	112474314	10,627	114363485	1,671	120484348	5,361

iber :

Data Sekunder Diolah
Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Dati I Jawa Tengah

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya dana pembangunan prasarana PBB tidak stabil (fluktuatif). Prosentase pertambahan kenaikan dana pembangunan prasarana tertinggi pada Propinsi Jawa Tengah adalah pada tahun 1999/2000 (15,766%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 (-16,515%) dari tahun sebelumnya.

Besarnya dana pembangunan prasarana tersebut tergantung dari besarnya pendapatan daerah serta prioritas pembangunan yang dilaksanakan.

4.2.4. Pendapatan Domestik Regional Bruto per Kapita

Pendapatan per Kapita penduduk menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan pendapatan per Kapita penduduk di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1997/1998 sampai dengan 2002 dapat dilihat pada Tabel 4.10. berikut ini :

TABEL NOMOR 4.10.
DATA PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO PER KAPITA
DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH TAHUN 1997/1998 - 2002 (X4)
(dalam rupiah)

Keterangan	1997/1998	1998/1999	%	1999/2000	%	2000	%	2001	%	2002	%
Karesidenan Semarang	10184125,45	11251581,67	10,482	19726289,07	75,320	15502934,6	-21,410	17709167,4	14,231	14257923,2	-19,488
Karesidenan Pekalongan	12294814,75	9233155,14	-24,902	9983317,25	8,125	13758257,7	37,812	12735461,5	-7,434	15790548,5	23,989
Karesidenan Banyumas	7569548,96	5819693,68	-23,117	7467990,95	28,323	6537974,11	-12,453	9502034,11	45,336	9684837,89	1,924
Karesidenan Pati	9126841,71	8936805,45	-2,082	9070868,39	1,500	11657932,6	28,521	15672164	34,433	12695963,3	-18,990
Karesidenan Surakarta	10498425,52	6684833,28	-36,325	9871506,86	47,670	13735982,7	39,148	15597302,2	13,551	14294832,7	-8,351
Karesidenan Kedu	8394351,65	7465467,71	-11,066	12798250,77	71,433	9296403,69	-27,362	10988844,2	18,205	15518863,9	41,224
Jumlah	58068108,04	49391536,93	-14,942	68918223,29	39,534	70489485,3	2,280	82204973,5	16,620	82242969,5	0,046

iber :

Data Sekunder Diolah
Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Dati I Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya dana pembangunan prasarana PBB tidak stabil (fluktuatif). Prosentase pertambahan kenaikan PDRB per Kapita tertinggi pada Propinsi Jawa Tengah adalah pada tahun 1999/2000 (39,534%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1998/1999 (-14,942%) dari tahun sebelumnya.

4.2.5. Penerimaan PBB

Penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang cukup penting. Pada Propinsi Jawa Tengah kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD menempati peringkat kedua, setelah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Perkembangan penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 1997/1998 sampai dengan 2002 dapat dilihat pada Tabel 4.11. berikut ini :

TABEL 4.11.
DATA PENERIMAAN PBB DI PROPINSI DATI I JAWA TENGAH (Y)
TAHUN 1997/1998-2002
(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	1997/1998	1998/1999	%	1999/2000	%	2000	%	2001	%	2002	%
Karesidenan Semarang	46801226	51905118	10,905	60186444	15,955	58134378	-3,410	80075434	37,742	99739999	24,558
Karesidenan Pekalongan	25914768	27102538	4,583	34849691	28,585	37893112	8,733	45186878	19,248	75787780	67,721
Karesidenan Banyumas	23465905	29903492	27,434	30601455	2,334	34403025	12,423	40577886	17,949	56209765	38,523
Karesidenan Pati	20726612	29759130	43,579	32961698	10,762	37885118	14,937	47545975	25,500	65527343	37,819
Karesidenan Surakarta	28644498	37260384	30,079	38786898	4,097	44584873	14,948	56076589	25,775	70085361	24,981
Karesidenan Kedu	17313542	21842374	26,158	20932341	-4,166	29215926	39,573	40200146	37,597	54907295	36,585
Jumlah	162866551	197773036	21,433	218318527	10,388	242116432	10,901	309662908	27,898	422257543	36,360

iber :

Data Sekunder Diolah
Kanwil Dirjen Pajak Bidang PBB Propinsi Dati I Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 4.11. tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun besarnya penerimaan PBB tidak stabil (fluktuatif). Prosentase pertambahan kenaikan penerimaan PBB tertinggi pada Propinsi Jawa Tengah adalah pada tahun 2002 (36,360%) dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 1999/2000 (10,388%) dari tahun sebelumnya.

Besarnya penerimaan PBB tersebut di atas diteliti lebih lanjut apakah benar-benar secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah penagihan, jumlah wajib pajak, dana prasarana pembangunan dan pendapatan per Kapita penduduk, sehingga dapat disusun implementasi strategis untuk meningkatkan penerimaan PBB.

4.3. Analisis Data

Pada bab ini akan dilakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi berganda. Data yang dianalisis berupa data kuantitatif yaitu data jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita penduduk. Pada analisis ini akan diperhitungkan apakah terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen pada taraf signifikan (α)=5%.

4.3.1. Persamaan Regresi

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan bantuan program SPSS (lihat Lampiran Analisis Regresi), dapat diketahui persamaan regresi pengaruh antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan pada Propinsi Jawa Tengah adalah :

$$Y = 41092894 + 36244653 X_1 + 8,271 X_2 + 0,899 X_3 + 3,271 X_4 + e$$

$$S_d = \quad \quad \quad 15236588 \quad \quad 3,801 \quad \quad 0,438 \quad \quad 0,751$$

$$t = \quad \quad \quad 2,379 \quad \quad 2,176 \quad \quad 2,051 \quad \quad 4,357$$

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa asumsi-asumsi dari model regresi yang perlu diuji validitasnya.

Asumsi dasar tersebut adalah sebagai berikut:

4.3.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi yaitu (1) Nilai R square (R^2) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (terikat); (2). Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas; (3). Melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 (Ghozali, 2001).

Berdasarkan output SPSS pada lampiran uji multikolinieritas Propinsi Jawa Tengah, dalam *model summary* menunjukkan nilai R square (R^2) yang tinggi yaitu

sebesar 0,680 (68%). Cara kedua bila dilihat berdasarkan dalam matriks korelasi antar variabel bebas menunjukkan koefisien antara variabel bebas sangat lemah, seperti yang ditunjukkan oleh variabel bebas PDRB per Kapita (X4) dengan jumlah surat penagihan (X1) sebesar 0,205 (20,5%); variabel bebas jumlah surat penagihan (X1) dengan dana prasarana pembangunan (X3) sebesar 0,189 (18,9%); variabel bebas dana prasarana pembangunan (X3) dengan jumlah wajib pajak terpilih (X2) sebesar 0,219 (21,9%); variabel bebas jumlah wajib pajak terpilih (X2) dengan jumlah surat penagihan (X1) sebesar 0,199 (19,9%). Dari hasil matriks korelasi antara variabel bebas tidak ada yang menunjukkan koefisien yang lebih dari 0,90. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah multikolinieritas.

Demikian juga cara ketiga apabila dilihat dari hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai yang kurang dari 0,1 (10%) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga tidak lebih dari 10. Dengan demikian dari tiga cara pendeteksian tersebut menunjukkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinieritas.

4.3.2.2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada/tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin watson (DW).

Berdasarkan output SPSS pada lampiran uji autokorelasi Propinsi Jawa Tengah, dalam *model summary*^b nilai Durbin Watson Propinsi Jawa Tengah sebesar

1,991. Nilai ini akan diperbandingkan dengan nilai DW tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, untuk n sejumlah 36 dan jumlah variabel bebas 4. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan nilai DW tabel sebagai berikut: batas atas (du) = 1,73 dan batas bawah (dl) = 1,24. Oleh karena nilai DW lebih besar daripada batas atas (du) 1,73 hal ini dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

4.3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas akan memperlemah kemampuan prediksi suatu model regresi. Model regresi dikatakan baik, apabila tidak terjadi heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik plot scatterplot antara variabel terikat ($ZPRED$) dengan residualnya ($SRESID$) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan Sumbu X adalah residualnya (Y prediksi - Y sesungguhnya). Apabila pola pada grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik yang dapat membentuk suatu pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila titik-titik pada grafik tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan grafik scatterplots antara $ZPRED$ dan $SRESID$ pada lampiran uji heteroskedastisitas Propinsi Jawa Tengah memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB berdasarkan masukan variabel-variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana prasarana pembangunan dan PDRB per Kapita.

4.3.2.4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau grafik histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik normal plot pada lampiran uji normalitas Propinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendeteksi normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Jumlah Surat Penagihan, Jumlah Wajib Pajak Terpilih, Dana Pembangunan Prasarana, dan Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita

Hipotesis penelitian yang berbunyi: Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana, dan pendapatan domestik regional bruto per kapita secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Dari hipotesis penelitian dikonversikan menjadi hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho : Jumlah surat penagihan, Jumlah wajib pajak terpilih, Dana pembangunan prasarana, dan Pendapatan domestik regional bruto per kapita tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Ha : Jumlah surat penagihan, Jumlah wajib pajak terpilih, Dana pembangunan prasarana, dan Pendapatan domestik regional bruto per kapita mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Dari hasil analisis regresi linier, tingkat signifikansi untuk variabel secara bersama-sama (jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana, dan pendapatan domestik regional bruto per kapita) menghasilkan nilai $F = 16,491$ dan $P \text{ value} = 0,000$. Berdasarkan tingkat signifikansi 5% Ho diterima apabila $P > 0,05$. Oleh karena nilai $P = 0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan kata lain Jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana, dan pendapatan domestik regional bruto per kapita secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Dari Lampiran Analisis Regresi (Lampiran) menunjukkan F hitung sebesar $16,491 > F$ tabel 2,68 sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a . artinya jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana, dan pendapatan domestik regional bruto secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Analisis koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Dari Lampiran Analisis Regresi Propinsi Jawa Tengah dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,639 atau sebesar 63,9%. Hal ini berarti variasi penerimaan PBB pada Propinsi Jawa tengah dapat dijelaskan oleh variasi keempat variabel independennya yaitu jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana, dan pendapatan domestik regional bruto dengan ketepatan 63,9%, sedangkan sisanya dijelaskan sebab-sebab lain diluar model.

4.4.2. Jumlah Surat Penagihan

Hipotesis penelitian yang pertama menyatakan bahwa: Jumlah surat penagihan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB, atau dalam hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut:

Ho : Jumlah surat penagihan tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Ha : Jumlah surat penagihan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Hasil analisis regresi linier menunjukkan koefisien regresi untuk variabel X1 (jumlah surat penagihan) = 36244653 dan P value = 0,024. Berdasarkan kriteria tingkat signifikansi 5% maka Ho diterima apabila $P > 0,05$. Oleh karena nilai $P = 0,024 < 0,05$, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan kata lain jumlah surat penagihan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

4.4.3. Jumlah Wajib Pajak Terpilih

Hipotesis penelitian yang kedua menyatakan bahwa: Jumlah wajib pajak terpilih mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB, atau dalam hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut:

Ho : Jumlah wajib pajak terpilih tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Ha : Jumlah wajib pajak terpilih mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Hasil analisis regresi linier, koefisien regresi untuk variabel X2 (jumlah wajib pajak terpilih) = 8,271 dan P value = 0,037. Berdasarkan kriteria tingkat signifikansi 5% maka Ho diterima apabila $P > 0,05$. Oleh karena nilai $P = 0,037 < 0,05$, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan kata lain jumlah wajib pajak terpilih mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

4.4.4. Dana Pembangunan Prasarana

Hipotesis penelitian yang ketiga menyatakan bahwa: Dana Pembangunan Prasarana mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB, atau dalam hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut:

- Ho : Dana pembangunan prasarana tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.
- Ha : Dana pembangunan prasarana mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Hasil analisis regresi linier, koefisien regresi untuk variabel X3 (jumlah dana pembangunan prasarana) = 0,899 dan P value = 0,049. Berdasarkan kriteria tingkat signifikansi 5% maka Ho diterima apabila $P > 0,05$. Oleh karena nilai $P = 0,049 < 0,05$, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan kata lain dana pembangunan prasarana mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

4.4.5. Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita

Hipotesis penelitian yang keempat menyatakan bahwa: Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB, atau dalam hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut:

- Ho : Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita tidak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.
- Ha : Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

Hasil analisis regresi linier menunjukkan koefisien regresi untuk variabel X4 (Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita) = 3,271 dan P value = 0,000.

Berdasarkan kriteria tingkat signifikansi 5% maka H_0 diterima apabila $P > 0,05$. Oleh karena nilai $P = 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Dengan kata lain Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan PBB.

4.5. Analisis Variabel-variabel yang mempengaruhi Penerimaan PBB di Propinsi Jawa tengah

4.5.1. Jumlah surat penagihan

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari variabel jumlah surat penagihan bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah, koefisien regresi dari variabel jumlah surat penagihan sebesar 36.244.653 berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah wajib pajak terpilih, dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita), apabila jumlah surat penagihan naik sebanyak 1 lembar, maka penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar Rp 36.244.653,-

Kenaikan penerimaan pajak PBB disebabkan karena jumlah surat penagihan mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena kapasitas administrasi sudah semakin baik dengan diterapkannya sistem SISTEP dan Kolektor. Hal ini sesuai dengan pendapat Zandjani (1992) bahwa kapasitas administrasi perpajakan jelas mempengaruhi kemampuan pemungutan pajak, maupun pendapat Todaro (1994) bahwa potensi perpajakan dengan administrasi perpajakan berkaitan sangat erat, administrasi yang efisien merupakan syarat terpenting untuk mencapai penerimaan maksimum, dan menggali potensi perpajakan suatu negara. Kenaikan surat penagihan tidak secara proporsional menaikkan penerimaan PBB, hal ini disebabkan surat penagihan tidak

selalu efektif untuk menagih tunggakan pajak dari WP, karena adanya keberatan dari WP atas besarnya PBB dan ketidaksadaran WP dalam membayar PBB. Oleh sebab itu kapasitas administrasi dapat semakin efektif apabila kesadaran masyarakat dalam membayar PBB semakin tinggi. Selain itu, nilai nominal dari setiap surat penagihan berbeda.

4.5.2. Jumlah Wajib Pajak Terpilih

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari variabel jumlah wajib pajak terpilih bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah, koefisien regresi dari variabel jumlah wajib pajak terpilih sebesar 8,271 berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, dana pembangunan prasarana, dan PDRB per kapita), apabila jumlah wajib pajak naik sebanyak 1000 orang,-, maka penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar Rp 8.271,-

Pengaruh jumlah wajib pajak terpilih tersebut dibandingkan dengan pengaruh jumlah surat penagihan terhadap penerimaan PBB lebih rendah dikarenakan besarnya tunggakan PBB setiap kali yang berhasil ditagih nominalnya akan lebih besar, yaitu akumulasi hutang PBB yang belum dibayarkan sampai dengan munculnya surat penagihan.

Kenaikan penerimaan PBB disebabkan karena jumlah wajib pajak terpilih mengalami kenaikan, sehingga pembayar PBB akan semakin meningkat pula. Pemungutan PBB tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat, baik jumlah dan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kenaikan jumlah wajib pajak terpilih yang tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan

PBB, rendahnya tingkat kesadaran/kepatuhan membayar pajak disebabkan subyek PBB belum tentu merupakan WP PBB. Hal ini karena yang didaftarkan oleh orang atau badan sebagai subyek pajak adalah semua tanah yang dimiliki dengan suatu hak dan/ atau dimanfaatkan serta semua bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai serta dapat dimanfaatkan.

Sesuai UU No. 12 tahun 1985 Pasal 4 bahwa subyek pajak adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak sebagaimana diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan yang dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan, sekalipun orang atau badan tersebut menyewa atau hanya sekedar numpang. Rochmat Soemitro (1989) menyatakan bahwa "asas manfaat" tersebut yang membayar PBB adalah orang memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau bangunan yang dinikmatinya. Kadang-kadang penyewa atau yang hanya sekedar numpang tidak memiliki kesadaran/kepatuhan membayar pajak. Hal ini berarti jumlah WP yang ada sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keaktifan petugas pajak dalam memberikan penyuluhan pajak serta adanya *law enforcement* terhadap pelanggaran UU perpajakan.

4.5.3. Dana Pembangunan Prasarana

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari variabel dana pembangunan prasarana bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah, koefisien regresi dari variabel dana pembangunan prasarana sebesar 0,899 berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dan

PDRB per kapita), apabila dana pembangunan prasarana naik sebanyak Rp 1000,-, maka penerimaan PBB di propinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar Rp 899,-.

Pengaruh tersebut mendukung teori yang menyatakan bahwa perkembangan pembangunan yang di wilayah setempat akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak, atau yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai objek pajak, pada akhirnya menjadi objek pajak PBB. Realisasi dana pembangunan prasarana menunjukkan tingkat fasilitas yang sudah dibangun yang dapat mendukung dan meningkatkan kelas obyek pajak serta dapat meningkatkan NJOP secara langsung.

4.5.4. PDRB per kapita

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa koefisien regresi dari variabel PDRB per kapita bertanda positif terhadap variabel penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah, koefisien regresi dari variabel PDRB per kapita sebesar 3,271 berarti dengan menganggap semua variabel yang lain konstan (variabel jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dan dana pembangunan prasarana), apabila PDRB per kapita naik sebanyak Rp 1000,-, maka penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar Rp 3.271,-

Pendapatan masyarakat (tercermin dalam PDRB) yang terbukti mempengaruhi penerimaan PBB tersebut sesuai dengan Rochmat Soemitro (1989) bahwa pemilik tanah pada umumnya memiliki kemampuan membayar pajak yang tinggi, oleh karenanya pemilik tanah dapat dijadikan ukuran, meski agak kasar mengenai kemampuan membayar pajak. Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Pihak pemerintah Propinsi Jawa Tengah perlu memikirkan untuk

meningkatkan PDRB-nya sehingga PDRB per kapitanya juga akan semakin meningkat:

4.6. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu apabila pemerintah daerah masing-masing, terutama KP-PBB ingin meningkatkan penerimaan PBB, maka perlu mengoptimalkan jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih, dana prasarana pembangunan serta PDRB per kapita penduduk.

Secara umum implementasi strategis dari faktor-faktor yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut jumlah surat penagihan mencerminkan kapasitas administrasi, pada KP-PBB perlu ditingkatkan. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, kapasitas administrasinya sudah semakin baik dengan diterapkannya sistem SISTEP dan Kolektor, walaupun belum sepenuhnya berjalan efektif. Oleh sebab itu pihak KP-PBB perlu melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, serta terus menerus mengadakan penyuluhan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Secara internal KP-PBB perlu melaksanakan program intensifikasi, yaitu mengintensifkan pelaksanaan penagihan dari aparat pajak yang sudah ada. Termasuk dalam hal ini adalah meningkatnya mutu pelayanan pajak, terutama *cross check* antar inspeksi pajak. Selain program intensifikasi, pihak KP-PBB perlu meningkatkan program ekstensifikasi dalam lebih menggali potensi pajak, yaitu dengan

mengadakan *cross checking* dengan dinas-dinas terkait, sehingga dapat diketahui perkembangan NJOP di wilayahnya maupun untuk menggali WP-WP yang baru.

Pemerintah juga perlu merevisi UU No. 12 tahun 1994 pasal 2 mengingat terdapat perubahan-perubahan perikehidupan di masyarakat selaras dengan perkembangan jaman. Terutama berkenaan dengan pasal 3 objek pajak yang disebutkan diantaranya adalah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, serta dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Pada yayasan/koperasi dan pramuka saat ini sudah tidak semata-mata demi kepentingan umum tetapi juga dalam rangka memperoleh keuntungan sehingga kepemilikan tanah dan bangunan perlu dikenakan PBB. Demikian pula di bidang kesehatan dan pendidikan.

Adapun berkenaan dengan dana pembangunan prasarana dan PDRB per kapita, perlu kerjasama secara terpadu dengan pemerintah daerah setempat. Dana prasarana pembangunan perlu dilaksanakan secara efektif untuk benar-benar dapat meningkatkan nilai bumi dan bangunan di wilayah yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat meningkatkan NJOP-nya. Dalam hal PDRB per kapita penduduk, pihak pemerintah daerah setempat perlu meningkatkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pergerakan ekonominya, sehingga dapat meningkatkan PDRB.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diajukan.

5.1 Kesimpulan

Populasi penelitian berasal dari hasil kombinasi data time series 6 (enam) tahunan dengan seluruh data di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (enam kota Karesidenan). Variabel penelitian terdiri dari 4 (empat) variabel bebas yaitu : Jumlah surat penagihan (X_1); Jumlah wajib pajak terpilih (X_2); Dana pembangunan prasarana (X_3); PDRB/Kapita (X_4) dan 1 (satu) variabel terikat yaitu : Penerimaan PBB (Y). Penarikan hipotesis penelitian berdasarkan nilai peluang ralat masing-masing variabel bebas (P value) sebesar 5%. Dari hasil analisis regresi linier berganda ternyata keempat variabel bebas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu bila dilihat dari :

- F hitung sebesar : $16,491 > F$ tabel sebesar : 2,68
- Nilai R square (R^2) = 0,639 atau 63,9 %; ini berarti bahwa variasi keempat variabel bebas yaitu jumlah surat penagihan, jumlah wajib pajak terpilih; Dana Pembangunan Prasarana dan PDRB / kapita dengan ketepatan 63,9 %, sedangkan sisanya dijelaskan faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh positif dan signifikan dapat disimpulkan berikut ini :

“Secara bersama-sama jumlah surat penagihan; jumlah wajib pajak terpilih; Dana Pembangunan Prasarana dan PDRB / kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah”. Adapun secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Jumlah surat penagihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Jumlah Wajib pajak terpilih berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (3) Dana pembangunan prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (4) Pendapatan Domestik Regional Bruto / kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diajukan saran kepada Pemerintah Daerah / Fiskus selaku aparat yang paling bertanggung jawab terhadap masalah perpajakan :

- (1) Oleh karena jumlah surat penagihan berpengaruh terhadap penerimaan PBB, maka perlu penanganan serius dalam hal penyediaan data yang akurat; meningkatkan mutu pelayanan / menyediakan tempat-tempat pembayaran yang dekat dengan lokasi wajib pajak.

- (2) Oleh karena jumlah wajib pajak terpilih berpengaruh terhadap penerimaan PBB, maka akuratisasi data yaitu pemutakiran data supaya dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan; mengadakan cross ceking dan meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait.
- (3) Oleh karena Dana pembangunan prasarana berpengaruh terhadap penerimaan PBB, maka kepada Pemerintah Daerah supaya mengadakan pengawasan / pemantauan di lapangan baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
- (4) Oleh karena PDRB / kapita berpengaruh terhadap Penerimaan PBB. maka kepada pemerintah daerah supaya menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principle Board (APB), 1970. *Basic Consept And Accounting Principle Underlying Financial Statement of Business Entreprises*. New York : APB, Statement Of The Accounting Standard Board No.4
- Abdul Ghofir. 2000. *"Optimalisasi PBB dalam Penerapan Otonomi Daerah"*. *Jurnal Pajak*, No. 1411/Tahun XXXII, 15 Januari 2000
- Anton Sitanggang. 2001. *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Arifin Sabeni, dan Imam Ghozali. 1988. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta. BPFE.
- Bambang Suhardito dan Bambang Sudibyo. 1996 . *Pengaruh Faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. Tesis Pascasarjana. UGM.
- Damodar, Gujarati. 1992. *Basic Econometrics*. Alih Bahasa : Sumarno Zain. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Davey, Kenneth. 1995. *Principles of Macro Economic*, 4th edition, South Western Publishing Co.
- Eggertsson Thrainn, 1990. *Economic Behavior and institutions*, Cambridge University Press, New York.
- Fraternessi. 2002. *Studi Empiris tentang pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak terhadap tingkat keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*.
- Fridman, Laurence.M, 1984. *American law London*. W.W. Narton & Company. Erman. Rajaguguk. 1993. *Pembaharuan PJPT Kedua dalam Era Globalisasi*. Surabaya : Kongres XII.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Gunadi, 1990. *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*. Abdi Tandur, Jakarta : 1999.

Guritno Mangkoesoebroto, 1993. *Ekonomi Publik*, Yogyakarta : BPFE – UGM.

Dr. Imam Ghozali, M.Com,Akt :2001 *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, ISBN; 1979. 704. 015. 1 Badan Penerbit : Undip.

Insukrindo, 1994. *Penerimaan Pajak*. Bandung : Djambatan

Mardiasmo, 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi

Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Penerjemah : Alfanius Sirait, dkk. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Moch Nazir, 1990, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalilea Indonesia

Nur Indrianto, dan Supomo Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. BPFE : UGM.

Prasetyo Aji, "Nilai Jual Kena Pajak Progresif Mengacu Pada Nilai Bangunan Per M ", *Jurnal Pajak*, No. 1417/Tahun XXXII, 15 April 2000.

Republik Indonesia.

-----, 1993, *Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*, Jakarta Sekretariat Negara R.I.

-----, 1985, *Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, (Lembaran-lembaran Negara No. 68 tahun 1985, Penjelasan dalam Lembaran Negara No. 312), Jakarta, Sekretariat Negara R.I.

-----, 1994, *Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, Sekretariat Negara R.I.

- , 1994. *Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, Jakarta, Sekretariat Negara R.I.
- , 1999, *Undang-Undang nomor 25 tahun 1989 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta : Penerbit Sejahtera Mandiri.
- , 1999, *Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Penerbit Sejahtera Mandiri.
- Rachmat Soemitro. 1989. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Suparmoko M, 1995. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE - UGM.
- Tri Handayani. 1994. *Analisis Penerimaan PBB di Kodia Dati II Semarang*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian FE - UGM
- Todaro MP, 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerjemah : Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar. Jakarta : Penerbit. Erlangga.
- Winangun, IGN Mayun, 2000. "Reformasi Perpajakan dan Pokok-Pokok Pikiran UU KUP". *Jurnal Pajak*. No. 1419/Tahun XXXII. 15 Mei 2000.
- Zandjani Tubagus Chairul Amachi. 1992. *Perpajakan*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.